

PENGARUH INFLASI, PDRB DAN UPAH MINIMUM TERHADAP PENYERAPAN TENAGA KERJA DI PROVINSI BALI

**I Gusti Agung Indradewa¹
Ketut Suardhika Natha²**

¹Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Udayana (Unud), Bali, Indonesia
e-mail: agung_indradewa@yahoo.com/telp.081934349667

²Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Udayana (Unud), Bali, Indonesia

ABSTRAK

Pertumbuhan jumlah penduduk di negara Indonesia semakin lama semakin besar, begitu juga pertumbuhan penduduk di Provinsi Bali. Pertambahan jumlah penduduk tentu mengakibatkan bertambahnya jumlah tenaga kerja. Jumlah tenaga kerja yang bertambah akan menjadi masalah dalam dunia ketenagakerjaan apabila jumlah tenaga kerja yang ada tidak sebanding dengan jumlah permintaan tenaga kerja yang mampu menyerapnya. Permasalahan ini menjadi penting mengingat erat kaitannya dengan pengangguran. Tingginya angka pengangguran nantinya akan meningkatkan probabilitas kemiskinan, dan fenomena-fenomena sosial-ekonomi di masyarakat seperti kriminalitas dan fenomena-fenomena lainnya. Provinsi Bali dengan potensi pariwisatanya ternyata masih memiliki jumlah pengangguran yang cukup banyak. Penelitian ini memiliki tujuan untuk mengetahui bagaimana pengaruh dari tiga faktor yang secara teori memiliki pengaruh terhadap penyerapan tenaga kerja. Ketiga faktor tersebut di Provinsi Bali adalah inflasi, Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) dan upah minimum. Data yang digunakan adalah data time series selama dua puluh tahun yakni dari tahun 1994 sampai dengan tahun 2013. Teknik analisis data yang digunakan adalah regresi linear berganda dengan aplikasi EViews. Setelah pengujian dilakukan, hasil yang diperoleh adalah secara simultan, ketiga variabel bebas yang diuji memiliki pengaruh yang signifikan, sedangkan secara parsial, Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) dan upah minimum memiliki pengaruh yang positif dan signifikan sementara inflasi memiliki pengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap penyerapan tenaga kerja di Provinsi Bali periode tahun 1994-2013.

Katakunci: Penyerapan tenaga kerja di Provinsi Bali, Inflasi, PDRB, dan Upah Minimum.

Population growth in the country of Indonesia progressively increasing in number, as well as population growth in the province of Bali. Population growth will certainly add to the amount of labor. Increasing the number of workers will be a problem in the world of employment if the amount of labor is not proportional to the number of jobs that can absorb them. This problem becomes important considering the close relation to unemployment. High unemployment will increase the probability of poverty, crime, and social phenomena in society-economy. Bali provincial tourism potential it still has a considerable amount of unemployment. This study has the aim to find out how the influence of the three factors which in theory have an impact on employment. The third factor in the Province of Bali is inflation, Gross Domestic Product (GDP) and the minimum wage. The data used are time series data for twenty years from 1994 until 2013. The data analysis technique used is multiple linear regression with EViews application. Once testing is done, the results obtained are simultaneous, three independent variables tested had a significant effect, while partial, Gross Domestic Product (GDP) and the minimum wage has a positive and significant influence while inflation has a negative and significant effect on employment in Bali Province year period 1994-2013.

Key Word: Absorption of labor in the Province of Bali, inflation, GDP, and the Minimum Wage

PENDAHULUAN

Pembangunan nasional di Indonesia tidak dapat dilepaskan dari pembangunan daerah, karena wilayah Indonesia terdiri atas provinsi-provinsi, kabupaten/kota serta daerah-daerah yang lebih kecil. Kegiatan pembangunan yang direncanakan dan dilakukan haruslah mampu menyentuh dan dirasakan hingga masyarakat kecil. Pembangunan memiliki definisi yang luas yaitu suatu proses multi dimensi yang mencakup adanya perubahan-perubahan yang penting di dalam akselerasi pertumbuhan ekonomi, struktu sosial, kesenjangan, pengangguran dan penanganan kemiskinan (Todaro, 2000:10). Tujuan inti dari proses pembangunan adalah: meningkatnya ketersediaan serta perluasan distribusi berbagai barang kehidupan pokok, meningkatnya standar hidup (pendapatan, penyediaan lapangan pekerjaan, dan perbaikan kualitas pendidikan) dan perluasan pilihan-pilihan ekonomis dan sosial (Arsyad, 2010:11).

Faktor tenaga kerja sebagai bagian dari sumber daya manusia (SDM) pada masa pembangunan nasional termasuk faktor yang teramat penting bagi keberhasilan terselenggaranya pembangunan nasional di Indonesia. Pemanfaatan jumlah angkatan kerja tentu akan mampu mempercepat pembangunan dan pertumbuhan nasional. Secara tradisonal pertumbuhan penduduk dan angkatan kerja dianggap sebagai salah satu faktor yang berpengaruh positif dalam memacu pembangunan nasional dan pertumbuhan ekonomi.

Indonesia yang merupakan negara berkembang adalah merupakan satu dari banyak negara yang memiliki masalah mengenai tenaga kerja. Masalah yang dimaksud adalah masalah mengenai tingginya jumlah pengangguran, dimana

diketahui pengangguran merupakan masalah yang menghambat proses pembangunan. Masalah ketenagakerjaan adalah masalah yang sangat luas dan kompleks. Masalah pengangguran muncul sebagai imbas dari jumlah tenaga kerja yang tidak seimbang dengan jumlah permintaan lapangan pekerjaan yang tersedia. Pengangguran yang jumlahnya bertambah terus menerus tentunya akan menambah beban perekonomian daerah dan mengurangi kesejahteraan rakyat (Hadi Sasana, 2009). Ketidak mampuan negara dalam mengurangi peningkatan angka pengangguran merupakan masalah yang cukup serius bagi pemerintah dan juga bagi masyarakat. Perumusan kebijakan yang dapat memberikan dorongan kepada perluasan lapangan kerja perlu dilakukan agar alat-alat dalam kebijakan ekonomi dapat secara efektif mengurangi pengangguran.

Keberhasilan sebuah pemerintahan dalam hal pembangunan dapat dinilai melalui dari seberapa jauh pemerintah mampu menciptakan dan menambah lapangan pekerjaan serta mengurangi jumlah pengangguran, dengan terciptanya lapangan pekerjaan yang yang baru dan semakin bertambah akan berdampak pada terserapnya tenaga kerja yang ada sehingga terjadi peningkatan pendapatan dan peningkatan daya beli yang pada akhirnya juga akan meningkatkan kesejahteraan masyarakat (Paramitha Purwanti, 2009:1). Akan tetapi, perlu juga disadari kenyataan yang ada bahwa kesempatan kerja tidak selalu terjelma menjadi penyerapan tenaga kerja dan tenaga kerja yang terserap bisa memiliki pekerjaan lebih dari satu (Passay dan Taufik, 1990).

Tabel 1.
Kondisi Umum Ketenagakerjaan di Provinsi Bali Tahun 1994-2013

Tahun	Jumlah Penduduk Usia Kerja (orang)	Angkatan Kerja (orang)	Penduduk Yang Bekerja (orang)	Pertumbuhan (%)
1994	2.379.424	1.679.968	1.620.632	
1995	2.391.171	1.663.334	1.603.993	-1,03
1996	2.420.073	1.646.406	1.584.827	-1,19
1997	2.432.689	1.691.281	1.645.408	3,82
1998	2.465.645	1.674.454	1.597.179	-2,93
1999	2.517.091	1.765.779	1.702.941	6,62
2000	2.598.942	1.752.769	1.712.954	0,59
2001	2.568.784	1.629.917	1.583.917	-7,53
2002	2.654.395	1.777.909	1.715.452	8,30
2003	2.773.628	1.910.054	1.765.317	2,91
2004	2.514.701	1.924.805	1.835.165	3,96
2005	2.569.445	2.002.171	1.895.741	3,30
2006	2.607.821	1.990.476	1.870.288	-1,34
2007	2.661.913	2.059.711	1.982.134	5,98
2008	2.696.136	2.009.278	2.029.730	2,40
2009	2.728.747	2.123.588	2.057.118	1,35
2010	2.902.573	2.246.149	2.117.358	2,93
2011	2.952.545	2.257.258	2.204.874	4,13
2012	3.008.973	2.316.033	2.268.708	2,90
2013	3.073.019	2.315.379	2.273.897	0,23

Sumber : Badan Pusat Statistik Provinsi Bali

Tabel 1. menunjukkan data mengenai kondisi umum ketenagakerjaan di Provinsi Bali tahun 1994-2013. Krisis moneter yang mulai melanda Indonesia pada tahun 1997 berdampak pada menurunnya pertumbuhan jumlah penduduk yang bekerja pada tahun 1998 yaitu sebesar -2,93 persen. Namun pada tahun berikutnya, pertumbuhan jumlah penduduk yang bekerja di Bali justru bertambah dengan cukup signifikan yaitu sebesar 6,62 persen, dimana hal ini menunjukkan bahwa kondisi ketenagakerjaan di Bali dapat pulih dengan cepat pasca krisis moneter. Pertumbuhan jumlah penduduk yang bekerja kembali turun secara berturut turut pada tahun 2000 dan 2001 dimana penurunan yang terjadi pada tahun 2001 cukup drastis yaitu sebesar -7,53 persen, hal ini diduga disebabkan

oleh naiknya harga bbm sehingga harga-harga faktor produksi ikut naik yang akhirnya juga berdampak pada penurunan penyerapan tenaga kerja.

Pada tahun-tahun berikutnya pertumbuhan jumlah penduduk yang bekerja mengalami fluktuasi hingga pada akhirnya Bali dihadapkan pada kejadian bom Bali satu pada tahun 2002 yang berdampak pada penurunan pertumbuhan penduduk bekerja pada tahun 2003 dan bom Bali kedua pada tahun 2005 yang berdampak pada penurunan penduduk bekerja pada tahun 2006. Pertumbuhan penduduk bekerja yang tertinggi terjadi pada tahun 2002 yaitu 8,30 persen dan yang terendah terjadi pada tahun 2001 yaitu sebesar -7,53 persen.

Meningkatnya jumlah tenaga kerja yang terserap dan bekerja di Provinsi Bali diduga dipengaruhi oleh terkendalinya tingkat inflasi, bertambahnya jumlah produk domestik regional bruto dan besar kecilnya pertumbuhan upah minimum provinsi yang ditentukan. Sebaliknya berkurangnya jumlah penyerapan tenaga kerja diduga dipengaruhi oleh turunnya produktifitas yang disebabkan tingkat inflasi yang tak terkendali, berkurangnya jumlah PDRB dan terlalu besarnya pertumbuhan UMP yang ditentukan. Kondisi penyerapan tenaga kerja di Provinsi Bali periode tahun 1994-2013 yang cenderung berfluktuasi dari tahun ke tahun menjadi ketertarikan tersendiri untuk dijadikan sebagai bahan penelitian, serta perlu juga diteliti sejauh mana peran inflasi, PDRB dan upah minimum berpengaruh terhadap fluktuasi penyerapan tenaga kerja di Provinsi Bali.

Berdasarkan latar belakang masalah, maka dapat dirumuskan tujuan dari penelitian ini adalah :

- 1) Untuk mengetahui pengaruh inflasi, PDRB dan upah minimum secara simultan terhadap penyerapan tenaga kerja di Provinsi Bali periode tahun 1994-2013.
- 2) Untuk mengetahui pengaruh inflasi, PDRB dan upah minimum secara parsial terhadap penyerapan tenaga kerja di Provinsi Bali periode tahun 1994-2013.

Berdasarkan pokok permasalahan tersebut diatas, maka tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah:

- 1) Untuk mengetahui pengaruh inflasi, PDRB dan upah minimum secara simultan berpengaruh terhadap penyerapan tenaga kerja di Provinsi Bali periode tahun 1994-2013.
- 2) Untuk mengetahui pengaruh inflasi, PDRB dan upah minimum secara parsial terhadap penyerapan tenaga kerja di Provinsi Bali periode tahun 1994-2013.

Hasil yang diperoleh dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi baik secara teoritis maupun praktis. Adapun kegunaan penelitian ini adalah:

- 1) Kegunaan Teoritis

Penelitian ini merupakan penerapan ilmu dan teori-teori yang diperoleh selama kuliah. Hasil dari penelitian yang penulis buat ini diharapkan dapat memberikan informasi, referensi, dan wawasan ilmu pengetahuan berupa tambahan bukti empiris sehingga dapat memberikan manfaat bagi pihak-pihak yang berkepentingan.

2) Kegunaan Praktis

Penelitian ini merupakan peluang bagi mahasiswa untuk dapat terjun langsung kelapangan kerja dan memperoleh pengetahuan dan ilmu praktis tentang bidang kerja yang dialami.

Tenaga kerja merupakan penduduk yang telah masuk dalam usia kerja. Undang – Undang No. 13 tahun 2003 Bab 1 pasal 1 ayat 2 mendefinisikan tenaga kerja adalah setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan guna menghasilkan barang atau jasa baik untuk memenuhi kebutuhan sendiri maupun untuk masyarakat. Analisis ketenagakerjaan, secara garis besar penduduk di suatu negara terlebih dahulu dibedakan menjadi dua golongan yaitu golongan tenaga kerja dan golongan bukan tenaga kerja, yang tergolong sebagai tenaga kerja adalah penduduk yang berada pada usia kerja, sebaliknya yang tidak tergolong tenaga kerja adalah penduduk yang belum berada pada usia kerja.

Inflasi dapat didefinisikan sebagai suatu proses dimana terjadi kenaikan harga-harga yang berlaku dalam suatu perekonomian. Inflasi memiliki tingkat yang berbeda dari satu periode ke periode lainnya dan berbeda pula dari satu negara ke negara lainnya (Sadono Sukirno, 2001:15). Boediono (2008:155) juga mendefinisikan inflasi merupakan kecenderungan dari harga-harga untuk naik secara umum dan terus menerus, akan tetapi kenaikan harga dari satu atau dua barang saja tidak dapat disebut sebagai inflasi, kecuali bila kenaikan tersebut meluas atau mengakibatkan kenaikan kepada sebagian besar dari harga-harga barang lainnya.

Menurut Nanga (2005:248) inflasi yang terjadi pada perekonomian di suatu daerah memiliki beberapa dampak dan akibat yang diantaranya adalah inflasi dapat menyebabkan perubahan-perubahan output dan tenaga kerja, dengan cara memotivasi perusahaan untuk memproduksi lebih atau kurang dari yang telah dilakukannya tergantung intensitasi inflasi yang terjadi. Apabila inflasi yang terjadi dalam perekonomian masih tergolong ringan, perusahaanaan berusaha akan menambah jumlah output atau produksi karena inflasi yang ringan dapat mendorong semangat kerja produsen dari naiknya harga yang mana masih dapat dijangkau oleh produsen. Keinginan perusahaan untuk menambah output tentu juga dibarengi oleh penambahan faktor-faktor produksi seperti tenaga kerja. Pada kondisi tersebut permintaan tenaga kerja akan meningkat, yang selanjutnya meningkatkan penyerapan tenaga kerja yang ada dan pada akhirnya mendorong laju perekonomian melalui peningkatan pendapatan nasional. Sebaliknya, apabila inflasi yang terjadi tergolong berat (hyper inflation) maka perusahaan akan mengurangi jumlah ouput akibat tidak terbelinya faktor-faktor produksi dan perusahaan juga akan mengurangi jumlah penggunaan tenaga kerja sehingga penyerapan tenaga kerja semakin berkurang dan pengangguran bertambah.

Penelitian yang dilakukan Novianti (2013) mengenai analisis faktor-faktor yang mempengaruhi penyerapan tenaga kerja sektor industri di Sumatera Utara dikatakan bahwa variabel inflasi memiliki pengaruh negatif terhadap permintaan tenaga kerja sektor industri di Sumatera Utara. Ini berarti semakin bertambahnya tingkat inflasi berarti semakin berkurang penyerapan tenaga kerjanya. Begitu juga sebaliknya, semakin berkurangnya tingkat inflasi maka semakin bertambah tenaga

kerja yang mampu diserap. Haug dan King (2011) menjelaskan bahwa inflasi yang terjadi di Amerika Serikat periode 1952-2010 memiliki hubungan positif terhadap jumlah pengangguran. Penelitian lainnya yang dilakukan Beyer dan Farmer (2007) di Amerika Serikat periode 1970-1999 mengidentifikasi bahwa ada hubungan yang positif antara inflasi terhadap pengangguran kemudian dilanjutkan oleh Berensten, Menzio dan Wright (2009) yang meneliti pada periode 1955-2005 yang juga mengatakan terdapat hubungan positif antara inflasi terhadap pengangguran. Kesimpulannya, teori dan penelitian-penelitian tersebut menunjukkan bahwa inflasi memiliki hubungan negatif terhadap jumlah penyerapan tenaga kerja. Apabila tingkat inflasi naik maka jumlah penyerapan tenaga kerja akan berkurang dan begitu juga sebaliknya.

Data Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) baik itu atas harga berlaku maupun atas dasar harga konstan merupakan indikator penting yang digunakan untuk mengetahui kondisi perekonomian suatu daerah dalam suatu periode. PDRB merupakan jumlah nilai tambah yang dihasilkan oleh seluruh unit usaha pada suatu daerah tertentu dan dapat juga dikatakan sebagai jumlah dari nilai barang dan jasa akhir (*neto*) yang dihasilkan oleh seluruh unit ekonomi (BPS, 2013).

Produk domestik daerah merupakan semua barang dan jasa yang dihasilkan dari kegiatan-kegiatan ekonomi yang berlangsung di wilayah domestik, tanpa memperdulikan asal dan kepemilikan faktor produksi dari penduduk daerah tersebut ataupun tidak. Penghitungan produk domestik lebih dikenal dengan istilah Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), disebut domestik karena

menyangkut batas wilayah dan dinamakan bruto karena telah memasukkan komponen penyusutan dalam perhitungannya.

PDRB atas dasar harga berlaku menggambarkan nilai tambah barang dan jasa yang dihitung menggunakan harga berlaku pada setiap tahun, sedangkan PDRB atas dasar harga konstan menggambarkan nilai tambah barang dan jasa yang dihitung menggunakan harga barang berlaku pada satu tahun tertentu sebagai dasar (Noviyani, 2007). PDRB atas dasar harga berlaku digunakan untuk melihat pergeseran dan struktur ekonomi sedangkan PDRB atas harga konstan digunakan untuk mengetahui pertumbuhan ekonomi dari tahun ketahun.

Mankiw (2006:248) menjelaskan, *hukum okun* adalah relasi negatif antara pengangguran dan GDP. Hukum okun merupakan pengingat bahwa faktor-faktor yang menentukan siklus bisnis pada jangka pendek sangat berbeda dengan faktor-faktor yang membentuk pertumbuhan ekonomi jangka panjang. Hukum Okun (Okun's law) merupakan hubungan negatif antara pengangguran dan GDP Riil, yang mengacu pada penurunan dalam pengangguran sebesar 1 persen dikaitkan dengan pertumbuhan tambahan dalam GDP Riil yang mendekati 2 persen. Dengan kata lain, PDRB yang pada akhirnya mempengaruhi GDP berpengaruh positif terhadap penyerapan tenaga kerja. Peningkatan jumlah PDRB akan berpengaruh pada peningkatan penyerapan tenaga kerja, begitu juga sebaliknya penurunan jumlah PDRB akan berpengaruh pada penurunan penyerapan tenaga kerja.

Hal tersebut didukung oleh hasil penelitian yang dilakukan oleh Dimas dan Nenek (2009) yang menyatakan bahwa PDRB memiliki pengaruh yang positif dan signifikan terhadap penyerapan tenaga kerja di DKI Jakarta, dimana apabila

PDRB meningkat satu persen maka penyerapan tenaga kerja meningkat sebesar 1,23 persen. Rakhmasari (2006) juga mengatakan bahwa faktor-faktor yang mempengaruhi penyerapan tenaga kerja salah satunya adalah PDRB dan memiliki hubungan positif yang selanjutnya diperkuat oleh hasil penelitian Ferdinan (2011) yang mengatakan bahwa besarnya PDRB merupakan faktor signifikan yang mempengaruhi penyerapan tenaga kerja di Provinsi Sumatera Barat yang juga memiliki pengaruh positif.

Budi Utami (2009) mengatakan bahwa Produk domestik regional bruto (PDRB) berpengaruh positif secara signifikan terhadap kesempatan kerja di Kabupaten Jember tahun 1980 s./d. 2007. PDRB merupakan cerminan dari pertumbuhan ekonomi (penambahan output yang dihasilkan), apabila PDRB meningkat maka jumlah kesempatan kerja akan semakin besar. Junaidi (2013) menyebutkan perkembangan PDRB memberikan dampak yang positif dan signifikan terhadap penyerapan tenaga kerja di Provinsi Sulawesi Utara. Putro dan Achma (2013) dalam penelitiannya menemukan bahwa PDRB berpengaruh negatif dan signifikan terhadap pengangguran, yang berarti peningkatan PDRB akan menurunkan jumlah pengangguran. Dengan kata lain, PDRB berpengaruh positif terhadap penyerapan tenaga kerja. Meningkatnya jumlah PDRB juga akan meningkatkan penyerapan tenaga kerja dan menurunkan jumlah pengangguran, dan begitu juga sebaliknya. Kesimpulannya, dari teori dan hasil penelitian-penelitian yang terdahulu PDRB memiliki pengaruh yang positif terhadap penyerapan tenaga kerja. Apabila jumlah PDRB meningkat maka jumlah penyerapan tenaga kerja juga akan meningkat, begitu juga sebaliknya.

Undang-Undang Republik Indonesia nomor 13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan menyebutkan bahwa upah adalah hak pekerja/buruh yang diterima dan dinyatakan dalam bentuk uang sebagai imbalan dari pengusaha atau pemberi kerja kepada pekerja/buruh yang ditetapkan dan dibayarkan menurut suatu perjanjian kerja, kesepakatan, atau peraturan perundang undangan, termasuk tunjangan bagi pekerja/buruh dan keluarga atas suatu pekerjaan dan/jasa yang telah atau akan dilakukan. Sadono Sukirno (2002:353) mendefinisikan upah yaitu pembayaran yang diperoleh berbagai bentuk jasa yang disediakan dan diberikan oleh pengusaha kepada tenaga kerja. Upah ditentukan dengan melibatkan evaluasi dari kontribusi karyawan sebagai bentuk penghargaan baik langsung maupun tidak langsung sesuai dengan kemampuan dari organisasi dan peraturan hukum yang berlaku (Fopuhunda, et al, 20011).

Penyerapan tenaga kerja berkaitan dengan jumlah tenaga yang diminta perusahaan atau instansi tertentu. Menurut Sumarsono (2003: 106) perubahan tingkat upah akan mempengaruhi tinggi rendahnya biaya produksi perusahaan. Gindling dan Terrell (2006) dalam penelitian yang dilakukannya mengatakan bahwa tingkat upah memiliki pengaruh terhadap penyerapan tenaga kerja, dimana setiap 10 persen kenaikan upah minimum terjadi penurunan pekerja di masing-masing sektor sebesar 1,09 persen. Menurut Kuncoro (2002), kenaikan upah akan mengakibatkan penurunan kuantitas tenaga kerja yang diminta. Apabila tingkat upah naik sedangkan harga input lain tetap, berarti harga tenaga kerja relatif mahal dari input lain. Situasi ini mendorong pengusaha untuk mengurangi

penggunaan tenaga kerja yang relatif mahal dengan input input lain yang harga relatifnya lebih murah guna mempertahankan keuntungan yang maksimum.

Rini (2013) di dalam penelitiannya, kenaikan upah minimum akan mengakibatkan berkurangnya lapangan kerja yang juga akan berimbas pada berkurangnya jumlah penyerapan tenaga kerja. Magruder (2013) dan Kholifah Anggrainy (2013) juga mengatakan bahwa upah minimum memiliki hubungan negatif terhadap permintaan tenaga kerja, dengan kata lain temuan tersebut menjelaskan bahwa kenaikan upah minimum akan mengurangi jumlah permintaan tenaga kerja sehingga jumlah penyerapan tenaga kerja juga berkurang.

Penelitian yang dilakukan Rizal Azaini (2014) menyatakan bahwa bertambahnya nilai upah bisa menyebabkan meningkatkan kehidupan layak seorang pekerja, tetapi jika peningkatan upah yang ditetapkan terlalu tinggi yang tidak disertai dengan peningkatan produksi kerja akan mendorong perusahaan untuk melakukan pengurangan terhadap penggunaan tenaga kerja dengan menurunkan produksi dan menggunakan teknologi padat modal. Hal ini dilakukan karena beban yang terlalu tinggi yang ditanggung perusahaan akibat bertambahnya nilai upah.

Sumarsosno (2003, dalam Fadliilah dan Atmanti, 2012) menjelaskan bahwa tingkat upah akan mempengaruhi biaya produksi. Naiknya tingkat upah akan meningkatkan biaya produksi perusahaan yang selanjutnya berdampak pada meningkatnya harga per unit barang yang diproduksi. Dengan kondisi tersebut, konsumen akan memberikan respon apabila terjadi kenaikan harga barang, konsumen akan mengurangi konsumsi atau bahkan tidak mau membeli barang

yang bersangkutan. Akibatnya banyak barang atau produk yang tidak terjual maka produsen harus menurunkan jumlah produksinya. Turunnya jumlah produksi mengakibatkan berkurangnya tenaga kerja yang dibutuhkan, itu berarti jumlah penyerapan tenaga kerja juga akan berkurang. Upah minimum yang turun memiliki manfaat yang baik terhadap Negara karena dalam jangka panjang pengangguran dapat berkurang (Danziger, 2009). Kesimpulannya, teori dan hasil penelitian-penelitian terdahulu menunjukkan bahwa upah minimum memiliki hubungan yang negatif terhadap penyerapan tenaga kerja. Apabila upah minimum naik maka penyerapan tenaga kerja akan berkurang dan begitu juga sebaliknya.

Penelitian ini diharapkan dapat membuktikan kebenaran teori-teori khususnya mengenai Pengaruh Inflasi, Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) dan Upah Minimum Terhadap Penyerapan Tenaga Kerja di Provinsi Bali Periode Tahun 1994-2013. Hipotesis penelitian dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Inflasi, produk domestik regional bruto dan upah minimum secara serempak berpengaruh signifikan terhadap penyerapan tenaga kerja di Provinsi Bali periode tahun 1994-2013.
2. Produk domestik regional bruto secara parsial berpengaruh positif dan signifikan terhadap penyerapan tenaga kerja di Provinsi Bali periode tahun 1994-2013 sedangkan inflasi dan upah minimum secara parsial berpengaruh negatif dan signifikan terhadap penyerapan tenaga kerja di Provinsi Bali periode tahun 1994-2013.

DATA DAN METODOLOGI

Lokasi dan Objek Penelitian

Lokasi dalam penelitian ini merupakan seluruh wilayah Provinsi Bali dengan menggunakan data Badan Pusat Statistik (BPS), yang berkaitan dengan Inflasi, (PDRB), dan Upah Minimum di Provinsi Bali periode tahun 1994-2013.

Jenis, Sumber Data dan Metode Pengumpulan Data

Penelitian ini menggunakan jenis data yaitu data kuantitatif antara lain data perkembangan inflasi, Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), dan upah minimum di Provinsi Bali periode tahun 1994-2013. Sumber datanya dari data yang berbentuk laporan tahunan dan telah disusun serta diterbitkan oleh Badan Pusat Statistik (BPS).

Pengumpulan data pada penelitian ini menggunakan metode teknik observasi non-perilaku, dimana peneliti sebagai pengamat independen.

Teknik Analisis Data

Penelitian ini menggunakan teknik analisis data analisis regresi linear berganda, pengujian simultan dengan Uji F, pengujian parsial dengan Uji t, pengujian model estimasi dengan asumsi klasik.

Bentuk umum persamaan dari analisis regresi linear berganda adalah sebagai berikut:

$$Y = \alpha + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \beta_3 X_3 + \mu \dots\dots\dots (1)$$

Keterangan :

- Y = Penyerapan Tenaga Kerja di Provinsi Bali periode 1994-2013
- X₁ = Inflasi yang terjadi di Provinsi Bali periode 1994-2013

- X_2 = Produk domestik regional bruto di Provinsi Bali periode 1994 - 2013
- X_3 = Upah Minimum di Provinsi Bali periode 1994-2013
- B_1, β_2, β_3 = Koefisien Regresi
- μ = Kesalahan Pengganggu

HASIL DAN PEMBAHASAN

Analisis Regresi Linear Berganda

Analisis regresi linear berganda digunakan untuk mengetahui pengaruh variabel bebas yaitu Inflasi (X_1), PDRB (X_2), dan Upah Minimum (X_3) terhadap variabel terikat yaitu penyerapan tenaga kerja (Y). Hasil regresi menggunakan program pengolah data Eviews kemudian dimasukkan ke dalam persamaan regresi berganda sebagai berikut :

$$\hat{Y} = 1490132 - 451,8501 X_1 + 0,011034 X_2 + 0,368165 X_3 \dots \dots \dots (2)$$

Berdasarkan rumus maka dapat diinterpretasikan sebagai berikut :

- 1) Nilai konstanta 1490132 ini bermakna bahwa apabila X_1 , X_2 , dan X_3 sama dengan 0 maka nilai penyerapan tenaga kerja sama dengan 1490132.
- 2) Apabila X_1 naik satu satuan maka nilai penyerapan tenaga kerja akan menurun sebesar 451,8501 dan sebaliknya apabila nilai X_1 turun satu satuan maka nilai penyerapan tenaga kerja naik sebesar 451,8501.
- 3) Apabila X_2 naik satu satuan maka nilai penyerapan tenaga kerja akan naik sebesar 0,011034 dan begitu juga sebaliknya, apabila X_2 turun sebesar satu satuan maka nilai penyerapan tenaga kerja turun sebesar 0,011034.

- 4) Apabila X_3 naik sebesar satu satuan maka nilai penyerapan tenaga kerja akan naik sebesar 0,368165 dan begitu juga sebaliknya, apabila X_3 turun sebesar satu satuan maka nilai penyerapan tenaga kerja turun sebesar 0,368165.

Tabel 2.
Hasil Analisis Regresi Linear Berganda

Variabel Terikat	Variabel Bebas	Koefisien Regresi	Standard Error	t-hitung	Prob.
Penyerapan Tenaga Kerja (Y)	Tingkat Inflasi (X_1)	-451,8501	800,4885	-0564468	0,5803
	PDRB (X_2)	0,011034	0,004213	2,619305	0,0186
	Upah Minimum (X_3)	0,368165	0,133513	2,757532	0,0140
<i>Constant</i> = 1490132			Sig = 0,0000		
<i>R-Squared</i> = 0,960					

Sumber: Data diolah

Uji Signifikansi Simultan (Uji F)

Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan nilai *P-value* sebesar 0,000000 $< \alpha$ maka H_0 ditolak atau H_1 diterima, ini berarti bahwa variabel inflasi, produk domestik regional bruto dan upah minimum secara simultan berpengaruh signifikan terhadap penyerapan tenaga kerja di Provinsi Bali periode 1994-2013 dengan tingkat keyakinan 95 % ($\alpha = 5\%$).

Uji Signifikansi Parsial (Uji t)

1) Pengaruh Inflasi terhadap Penyerapan Tenaga Kerja

Nilai p (0,56) $> \alpha$ (0,05) menunjukkan bahwa H_0 diterima, ini berarti variabel tingkat inflasi (X_1) tidak berpengaruh secara parsial dan nilai koefisien

regresi yang bertanda negatif (-451,8501) menunjukkan tingkat inflasi memiliki pengaruh negatif terhadap penyerapan tenaga kerja di Provinsi Bali periode tahun 1994-2013. Naiknya tingkat inflasi dapat berakibat pada turunnya penyerapan tenaga dan begitu juga sebaliknya, turunnya tingkat inflasi dapat menambah penyerapan tenaga kerja.

Hasil yang menyatakan bahwa variabel tingkat inflasi (X_1) tidak berpengaruh secara parsial terhadap penyerapan tenaga kerja di Provinsi Bali ini tidak sesuai dengan teori dan pandangan kaum monetaris mengenai inflasi yang mengatakan inflasi dapat mempengaruhi kesempatan kerja, dan teori A. W Philips yang mengatakan adanya hubungan yang sangat erat antara tingkat inflasi dengan tingkat pengangguran yang tidak lain adalah lawan dari penyerapan tenaga kerja serta hasil-hasil penelitian sebelumnya yaitu Dian Novianti (2013) yang mengatakan bahwa terdapat hubungan parsial yang negatif dan signifikan antara inflasi dengan penyerapan tenaga kerja di suatu daerah.

Hasil yang didapat tidak signifikan dengan nilai koefisien yang besar kemungkinan spurius, karena terlihat ada trend pada penyerapan tenaga kerja dan PDRB dan hasil yang tidak signifikan didapat dikarenakan inflasi yang terjadi di Provinsi Bali lebih banyak terjadi pada barang konsumsi dan rata-rata inflasi yang terjadi selama periode 1994-2013 adalah sebesar 10,50 persen yang tergolong inflasi sedang, sehingga tingkat inflasi yang demikian memiliki pengaruh yang sangat kecil terhadap penyerapan tenaga kerja.

2) Pengaruh PDRB terhadap Penyerapan Tenaga Kerja

Nilai p (0,02) < α (0,05) menunjukkan bahwa H_0 ditolak, hal ini berarti variabel PDRB (X_2) memiliki pengaruh yang signifikan secara parsial dan nilai koefisien regresi yang bertanda positif (0,011034) menunjukkan PDRB memiliki pengaruh positif terhadap penyerapan tenaga kerja di Provinsi Bali periode tahun 1994-2013. Itu artinya, naiknya PDRB akan meningkatkan penyerapan tenaga kerja dan begitu sebaliknya, turunnya PDRB akan mengurangi penyerapan tenaga kerja.

Nilai koefisien regresi PDRB (X_2) atas dasar harga konstan sebesar 0,011034 secara statistik menunjukkan bahwa apabila nilai PDRB meningkat satu-satuan maka nilai penyerapan tenaga kerja juga akan meningkat sebesar 0,011034 persen dengan syarat variabel lain konstan. Hal tersebut di dukung oleh hasil penelitian yang dilakukan oleh Dimas dan Nenek (2009) yang menyatakan bahwa PDRB memiliki pengaruh yang positif dan signifikan terhadap penyerapan tenaga kerja di DKI Jakarta, dimana apabila PDRB meningkat satu persen maka penyerapan tenaga kerja meningkat sebesar 1,23 persen. Rakhmasari (2006) juga mengatakan bahwa faktor-faktor yang mempengaruhi penyerapan tenaga kerja salah satunya adalah PDRB dan memiliki hubungan positif yang selanjutnya diperkuat oleh hasil penelitian Ferdinan (2011) yang mengatakan bahwa besarnya PDRB merupakan faktor signifikan yang mempengaruhi penyerapan tenaga kerja di Provinsi Sumatera Barat yang juga memiliki pengaruh positif.

3) Pengaruh Upah Minimum terhadap Penyerapan Tenaga Kerja

Nilai p ($0,01$) $<$ α ($0,05$) menunjukkan bahwa upah minimum memiliki pengaruh yang signifikan secara parsial, akan tetapi nilai koefisien regresi yang bertanda positif ($0,368165$) berlawanan dengan hipotesis yang menyatakan upah minimum memiliki pengaruh yang negatif terhadap penyerapan tenaga kerja. Ini artinya, naiknya upah minimum akan meningkatkan penyerapan tenaga kerja dan begitu juga sebaliknya, turunnya upah minimum akan menurunkan jumlah penyerapan tenaga kerja.

Nilai koefisien regresi upah minimum (X_3) sebesar $0,368165$ secara statistik menunjukkan bahwa apabila upah minimum naik satu-satuan maka nilai penyerapan tenaga kerja juga akan meningkat sebesar $0,368165$ persen. Hal ini tidak sesuai dengan teori Sumarsono (2003: 106), upah akan mempengaruhi tinggi rendahnya biaya produksi yang dapat mengakibatkan pengurangan ataupun penambahan jumlah penggunaan atau penyerapan tenaga kerja, dan berdasarkan hasil-hasil penelitian sebelumnya seperti penelitian Rini (2012), Rizal (2014) serta Gindling dan Terrell (2007) yang mengatakan upah minimum memiliki pengaruh negatif terhadap penyerapan tenaga kerja.

Peningkatan upah minimum mempengaruhi daya beli masyarakat yang mengakibatkan permintaan menjadi meningkat dan diikuti oleh makin banyaknya perusahaan yang masuk pasar sehingga penyerapan tenaga kerja yang dilakukan perusahaan juga akan semakin meningkat dan karena dengan adanya tingkat upah yang dinaikkan para pengusaha akan mengupayakan untuk dapat meningkatkan atau menambah jumlah dari unit usahanya sehingga diharapkan dengan adanya

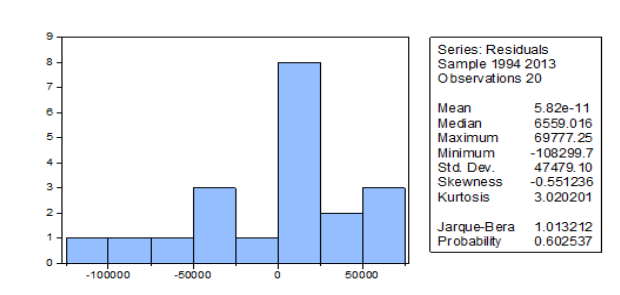
penambahan dari jumlah unit usaha, pengusaha juga akan menambah jumlah dari tenaga kerjanya.

Penelitian ini memiliki hasil yang sejalan dengan hasil dari penelitian yang dilakukan Ricky (2012) yang mengatakan upah memiliki pengaruh yang positif signifikan terhadap penyerapan tenaga kerja pada industri mebel di Kecamatan Pedurungan Kota Semarang . Begitu juga dari hasil penelitian Lustig dan McLeod (1996) yang mengatakan bahwa upah minimum justru meredistribusi sumber daya dan potensial, meningkatkan penghasilan serta penyerapan tenaga kerja.

Pengujian Asumsi Klasik

a) Uji Normalitas

Dalam penelitian ini metode yang digunakan untuk uji normalitas adalah dengan statistik Jarque-Bera dimana pada Gambar 1. Hasil uji menunjukkan nilai statistik Jarque-Bera hasil bahwa nilai probabilitasnya adalah $0,602537 > 0,05$, hal ini bermakna bahwa residual data yang digunakan adalah berdistribusi normal dan layak digunakan untuk memprediksi.



Gambar 1. Hasil Uji Normalitas Residual

Sumber: Data diolah

b) Uji Multikolinearitas

Model regresi yang baik adalah regresi yang tidak ada gejala korelasi yang kuat di antara variabel bebasnya. Model regresi yang baik seharusnya tidak terjadi korelasi diantara variabel bebasnya. Pengujian multikolinearitas dalam penelitian ini menggunakan matriks korelasi antar variabel bebas untuk melihat besarnya korelasi antarvariabel bebas. Hasil pengujian disajikan pada Tabel 2 dimana ditunjukkan bahwa tidak ada nilai koefisien korelasi antarvariabel yang lebih besar dari 0,8. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat gejala multikoliearitas yang serius antarvariabel bebas tersebut.

Tabel 3.
Hasil Perhitungan Regresi Pendekatan Korelasi Bivarian

	X1	X2	X3	Y
X1	1.000	-0.277	-0.247	-0.286
X2	-0.277	1.000	0.754	0.670
X3	-0.247	0.754	1.000	0.764
Y	-0.286	0.670	0.764	1.000

Sumber: Data diolah

c) Uji Autokorelasi

Autokorelasi menunjukkan korelasi diantara anggota serangkaian observasi yang diurutkan menurut waktu dan ruang. Untuk mendeteksi ada atau tidaknya autokorelasi dalam ini maka dilakukan uji LM (metode *Bruesch Godfrey*). Metode ini didasarkan pada nilai F dan $Obs^* R\text{-Squared}$, dimana jika nilai probabilitas dari $Obs^* R\text{-Squared}$ melebihi tingkat kepercayaan, maka H_0 diterima. Artinya, tidak ada masalah autokorelasi, begitu juga sebaliknya. Dalam penelitian ini hasil pengujian disajikan pada Tabel 3 dimana ditunjukkan pada

Tabel 3 dengan nilai probabilitas dari $Obs^* R\text{-Squared}$ $0,9375 > 0,05$ artinya tidak terjadi gejala autokorelasi.

Tabel 4.
Uji Autokorelasi

Breusch-Godfrey Serial Correlation LM Test:

F-statistic	0.045455	Prob. F(2,14)	0.9557
Obs*R-squared	0.129032	Prob. Chi-Square(2)	0.9375

Sumber: Data diolah

d) Uji Heterokedastisitas

Heteroskedastisitas merupakan keadaan di mana semua gangguan yang muncul dalam fungsi regresi populasi tidak memiliki varians yang sama. Dalam penelitian ini menggunakan uji *White Heteroscedasticity* yang tersedia dalam program EViews. Hasil yang diperhatikan dari uji ini adalah nilai F dan $Obs^* R\text{-Squared}$. Jika nilai $Obs^* R\text{-Squared}$ lebih kecil dari α maka H_0 ditolak yang berarti ada heteroskedastisitas, demikian juga sebaliknya. Dalam penelitian ini disajikan pada Tabel 4 dimana yang ditunjukkan dalam Tabel 4 dengan nilai p -value $Obs^* R\text{-Squared}$ $0,6447 > 0,05$ artinya tidak ada heteroskedastisitas.

Tabel 5.
Uji Heteroskedastisitas

Heteroskedasticity Test: White

F-statistic	0.484401	Prob. F(3,16)	0.6978
Obs*R-squared	1.665255	Prob. Chi-Square(3)	0.6447
Scaled explained SS	1.076521	Prob. Chi-Square(3)	0.7827

Sumber: Data diolah

SIMPULAN

Dari hasil penelitian yang telah dijelaskan sebelumnya, maka simpulan yang dapat diperoleh adalah sebagai berikut :

- 1) Tingkat inflasi, PDRB dan upah minimum secara simultan berpengaruh signifikan terhadap penyerapan tenaga kerja di Provinsi Bali periode tahun 1994-2013. Secara bersama-sama pengaruh variabel bebas terhadap variabel terikat sebesar 96,0%. Sedangkan selebihnya 4,0% dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak dimasukkan dalam model.
- 2) Variabel inflasi secara parsial tidak berpengaruh signifikan terhadap penyerapan tenaga kerja di Provinsi Bali yang ditunjukkan dari nilai probabilitas $(0,56) > \alpha (0,05)$. Koefisien regresi yang bertanda negatif $(-451,85)$ menunjukkan bahwa variabel inflasi memiliki pengaruh yang berlawanan arah terhadap penyerapan tenaga kerja, artinya apabila terjadi kenaikan tingkat inflasi maka berpotensi mengurangi penyerapan tenaga kerja dan begitu juga sebaliknya.
- 3) Variabel PDRB secara parsial memiliki pengaruh yang signifikan terhadap penyerapan tenaga kerja di Provinsi Bali yang ditunjukkan dari nilai probabilitas $(0,01) < \alpha (0,05)$. Koefisien regresi yang bertanda positif $(0,0110)$ menunjukkan bahwa variabel PDRB memiliki pengaruh yang searah terhadap penyerapan tenaga kerja, artinya apabila terjadi kenaikan nilai PDRB maka berpotensi menambah penyerapan tenaga kerja dan begitu juga sebaliknya.
- 4) Variabel upah minimum secara parsial memiliki pengaruh yang signifikan terhadap penyerapan tenaga kerja di Provinsi Bali yang ditunjukkan dari nilai

probabilitas $(0,01) < \alpha (0,05)$. Koefisien regresi yang bertanda positif (0,3681) menunjukkan bahwa variabel upah minimum memiliki pengaruh yang searah terhadap penyerapan tenaga kerja, artinya apabila terjadi kenaikan upah minimum maka berpotensi menambah penyerapan tenaga kerja dan begitu juga sebaliknya.

SARAN

Dari simpulan penelitian, maka saran yang dapat dikemukakan yaitu:

Penyerapan tenaga kerja di Provinsi Bali dapat dimaksimalkan salah satunya dengan cara terus meningkatkan laju pertumbuhan PDRB, peningkatan kualitas sumber daya manusia sehingga nantinya membentuk pribadi yang kreatif dan siap pakai. Peningkatan laju pertumbuhan PDRB yang komposisi utamanya terdiri dari konsumsi dan investasi, dapat juga dilakukan pemerintah dengan merangsang timbulnya konsumsi masyarakat melalui kebijakan UMR yang mendukung daya beli dan merangsang investasi masuk ke daerah dengan pemudahan syarat-syarat berinvestasi. Dukungan pemerintah melalui kebijakan dalam mengatur laju inflasi dan penentuan upah minimum juga dirasakan perlu agar nantinya dapat mempengaruhi dan memaksimalkan penyerapan tenaga kerja.

Referensi

- Arsyad, Lincoln. 2010. *Ekonomi Pembangunan*. Edisi kelima. UPP STIM YKPN. Yogyakarta.
- Berentsen, A. Menzio, G. Wright, R. 2009. Inflation and unemployment in the long run. Working Paper. Institute for Empirical Research in Economics University of Zurich.
- Beyer, A. Farmer, R.E. 2007. Natural rate doubts. *Journal of Economic Dynamics and Control*. 31(3), pp.797-825.
- Boediono. 2008. *Ekonomi Makro*. Edisi Keempat. Fakultas Ekonomi UGM. Yogyakarta.
- Budi Utami, Turminijati. 2009. Pengaruh Upah Minimum Kabupaten, Produk Domestik Regional Bruto, Angkatan Kerja dan Investasi terhadap Kesempatan Kerja di Kabupaten Jember. *Jurnal Perencanaan Wilayah dan Pembangunan*. Vol. 1. No. 1.
- Danziger Leif. 2009. The Elasticity of Labour Demand and the Minimum Wage. *Journal of Population Economics*. Vol. 22. No. 3(Jul, 2009). pp. 757-722.
- Dian Novianti Sitompul. 2013. *Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi penyerapan Tenaga Kerja Sektor Industri di Sumatera Utara*. *Jurnal Universitas Negeri Medan*.
- Dimas. Nenek Woyanti. 2009. *Penyerapan Tenaga Kerja di DKI Jakarta*. *Jurnal Bisnis dan Ekonomi*. Vol. 16. No. 1. Hal. 32-41.
- Ferdinan, Hery. 2011. Pengaruh Pengeluaran Pemerintah, Pdrb, dan Upah Riil terhadap Penyerapan Tenaga Kerja di Sumatera Barat. Skripsi Fakultas Ekonomi dan Manajemen. Institut Pertanian Bogor.
- Fopuhunda. Tinuke. Atiku. Sulaiman Olusegun. Lawal Ibrahim Olanrewaju. 2011. Minimum Wage Implementation and Management in a Posr Recession Economy : The Nigerian Experience. *European Scienjtific Journal*. 8(7), p:18-35.
- Gindling T.H and Terrell Katherine. 2006. The Effects of Multiple Minimum Wage Throughout the Labour Market: The Case os Costa Rica. *Journal of Labour Economics*. 14 (2007) 485-511.
- Hadi Sasana. 2009. *Analisis Dampak Pertumbuhan Ekonomi, Kesenjangan Antar Daerah Dan Tenaga Kerja Terserap Terhadap Kesejahteraan Di*

Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Tengah Dalam Era Desentralisasi Fiskal. Jurnal Bisnis dan Ekonomi. Vol. 16. No. 1. Fakultas Ekonomi Universitas Diponegoro. Semarang.

- Haryo Kuncoro. 2002. Upah Sistem Bagi Hasil dan Penyerapan Tenaga Kerja. Jurnal Ekonomi Pembangunan. Kajian Ekonomi Negara Berkembang, hal 45-56 Vol. 7, No 1, 2002. ISSN: 1410-2641.
- Haug, Alfred A, Ian P. King. 2011. Empirical Evidence on Inflation and Unemployment in the Long Run. University of Otago Economics Discussion Papers No. 1109. 1-25.
- Junaidi, E. Momongan. 2013. Investasi PMA dan PMDN Pengaruhnya terhadap Perkembangan PDRB dan Penyerapan Tenaga Kerja serta Penanggulangan Kemiskinan di Sulawesi Utara. Jurnal EMBA. Vol. 1. No. 3. Hal. 530-539.
- Kholifah Anggrainy. 2013. Analisis Dampak Kenaikan Upah Minimum Kota (UMK) terhadap Kesempatan Kerja dan Investasi. Jurnal Ilmiah. FEB Universitas Brawijaya. Malang.
- Lustig, Nora, Darryl McLeod. 1996. Minimum Wages and Poverty In Developing Countries: Some Empirical Evidence. *Dept. Of Economics. Fordham University Discussion Papers In International Economics No. 25.*
- Magruder. Jeremy R. 2013. Can Minimum Wages cause a Big Push? Evidence from Indonesia. *Journal of Development Economic.* 100 (2013) 48-62.
- Nanga, Muana. 2005. Makro Ekonomi: Teori, Masalah, dan Kebijakan. Edisi Kedua. PT Raja Grafindo Persada. Jakarta.
- N. Gregory Mankiw. 2006. Makro ekonomi. Edisi 6. Erlangga. Jakarta.
- Noviyani. 2007. Hubungan Penerimaan dengan Produk Domestik Regional Bruto Perkapita Provinsi di Indonesia. Skripsi. Sarjana Ekonomi pada Departemen Ilmu Ekonomi Institut Pertanian Bogor.
- Pasay, N.H.A. dan S. Taufik. 1990. *Produktivitas Pekerja di Industri Pengolahan dalam M.A. Anwar dan I.J. Aziz (Edt.), Prospek Ekonomi Indonesia 1990/1991 dan Pengembangan Sumber Daya Manusia.* Lembaga Penerbit FE UI. Hal. 214-234. Jakarta.
- Pramitha Purwanti, Putu, Ayu. 2009. *Analisis Kesempatan Kerja Sektoral di Kabupaten Bangli dengan Pendekatan Pertumbuhan Berbasis Ekspor..* Jurnal Ekonomi Pembangunan. Vol. 5, No. 1, 2009, ISSN 1907-3275. Fakultas Ekonomi Universitas Udayana. Denpasar.

- Putro, Akbar Sis. Achma Hendra Setiawan. 2013. Analisis Pengaruh Produk Domestik Regional Bruto, Tingkat Upah Minimum Kota, Tingkat Inflasi dan Beban/Tanggungans Penduduk terhadap Pengangguran Terbuka di Kota Magelang Periode Tahun 1990 – 2010. *Diponegoro Journal Of Economics*. Vol. 2. No. 3. Hal. 1-14.
- Rakhmasari, Arum Oktaviningsih. 2006. Analisis Pengaruh Nilai Upah Minimum Kabupaten terhadap Investasi, Penyerapan Tenaga Kerja dan PDRB di Kabupaten Bogor. Skripsi Fakultas Ekonomi dan Manajemen. Institut Pertanian Bogor.
- Riky Eka Putra. 2012. Pengaruh Nilai Investasi, Nilai Upah, Dan Nilai Produksi Terhadap Penyerapan Tenaga Kerja Pada Industri Mebel Di Kecamatan Pedurungan Kota Semarang. *Economics Development Analysis Journal*. Vol. 1. No. 2. Hal. 1-17.
- Rini Sulistiawati. 2013. *Pengaruh Upah Minimum terhadap Penyerapan Tenaga Kerja dan Kesejahteraan Masyarakat di Provinsi di Indonesia*. *Jurnal EKSOS*. Vol. 8. No. 3. Halaman 195-211
- Rizal Azaini, Muhamad. 2014. *Analisis Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Upah Minimum dan Investasi terhadap Penyerapan Tenaga Kerja di Kota Malang Tahun 1998-2012*. *Jurnal Ilmiah*. Fakultas Ekonomi dan Bisnis universitas Brawijaya. Malang.
- Sadono, Sukirno. 2001. Pengantar Teori Makro. Edisi Kedua. PT Raja Grafindo Persada. Jakarta.
- _____. 2002. Pengantar Teori Ekonomi Mikro. Edisi Ketiga. PT Grafindo Persada. Jakarta.
- Sumarsono, Sony. 2003. *Ekonomi Manajemen Sumber Daya Manusia dan Ketenagakerjaan*. Graha Ilmu. Yogyakarta
- Todaro, M. P. 2000. *Pembangunan Ekonomi di Dunia Ketiga*. Jilid I. Edisi Keenam. Erlangga. Jakarta.
- Undang - undang Republik Indonesia Nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.